



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026 : 131 – 150

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8643

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

Strategi Peningkatan Pendapatan Sebagai Upaya Menurunkan Kemiskinan Ekstrem di Desa Locus Prioritas Kabupaten Tangerang

Income Genertion Strategies To Reduce Extreme Poverty In Priority Locus Villages Of Tangerang District

¹Rizal Fahmi; ²Dewi Ajeng Khutomah; ³Hudaya Latuconsina; ⁴Hilman

^{1,3,4}Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang ²Universitas Gadjah Mada

Email: rfahmi@unis.ac.id

(Diterima: 11-Maret-2026; Ditelaah: 04-Juni-2026; Disetujui: 25-Juli-2026)

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menjadi sumber utama kekurangan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas disegala bidang kehidupan. Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu daerah dengan desa locus prioritas kemiskinan, apabila dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017-2024 mengalami tren peningkatan. Berdasarkan data BPS (2017-2024) menyebutkan, peningkatan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu tersebut setiap tahun naik sebesar 5.21% per tahun atau 10.69 ribu per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sektor ketenagakerjaan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di desa-desa locus prioritas Kabupaten Tangerang serta merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kontribusi sektor ketenagakerjaan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini mengandalkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017–2024 serta dokumen kebijakan daerah. Analisis dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), serta pola pekerjaan penduduk miskin terhadap tingkat kemiskinan di wilayah studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang ketenagakerjaan, upaya yang diperlukan mencakup penambahan kartu prakerja bagi penduduk miskin produktif, peningkatan kompetensi dan pendampingan melalui pendidikan dan pelatihan profesi, serta peningkatan produktivitas hasil industri rumah tangga. Sementara bidang ekonomi, strategi yang diperlukan meliputi pembinaan petani miskin dan nelayan di enam desa, peningkatan keterampilan petani, penambahan cakupan penerima KUR pedagang, peningkatan literasi

Rizal Fahmi; Dewi Ajeng Khutomah, Hudaya Latuconsina; Hilman (2026). *Strategi Peningkatan Pendapatan Sebagai Upaya Menurunkan Kemiskinan Ekstrem di Desa Locus Prioritas Kabupaten Tangerang*

keuangan, optimalisasi BUMDes, pendirian ekosistem industri rumah tangga, dan optimalisasi wisata desa.

Kata kunci: desa lokus prioritas, ekonomi, kemiskinan ekstrem, kabupaten tangerang, ketenagakerjaan

ABSTRACT

Poverty is a social problem that is the main source of deprivation for everyone to carry out activities in all areas of life. Kabupaten Tangerang, as one of the regions with poverty priority villages, when viewed from the number and percentage of poor people, shows that during the 2017-2024 period there was an increasing trend. Based on BPS data (2017-2024), the increase in the number of poor people during this period every year increased by 5.21% per year or 10.69 thousand per year. This study aims to analyze the role of the employment sector in reducing extreme poverty in the priority locus villages of Kabupaten Tangerang and formulate effective strategies and policies to increase the contribution of the employment sector in efforts to alleviate extreme poverty in the region. The research method used is descriptive qualitative, relying on secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) for 2017-2024 and regional policy documents. The analysis was conducted through a thematic approach to identify the relationship between the open unemployment rate, labor force participation rate, and employment patterns of the poor to the poverty rate in the study area. The results show that in the labor sector, the efforts needed include the addition of pre-employment cards for the productive poor, increasing competence and mentoring through education and professional training, and increasing the productivity of home industry products. Meanwhile, in the economic sector, the necessary strategies include coaching poor farmers and fishermen in six villages, improving farmers' skills, increasing the coverage of KUR merchants, improving financial literacy, optimizing BUMDes, establishing home industry ecosystems, and optimizing village tourism.

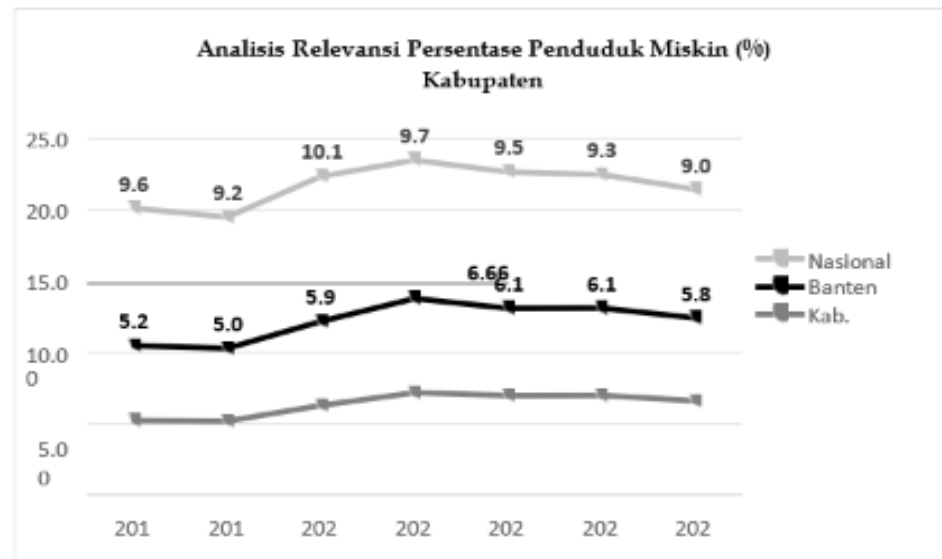
Keywords: priority locus villages, extreme poverty, employment, economy, tangerang district

A. PENDAHULUAN

Oleh karenanya, masalah kemiskinan bersifat multi-dimensional sehingga memerlukan penanganan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dukungan dari swasta. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara (Setiawan, 2017; Amelia et al., 2025). Salah satu wilayah yang turut melakukan upaya ini adalah Kabupaten Tangerang, Banten.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tangerang dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017-2024 mengalami tren peningkatan. Berdasarkan data BPS (2017-2024) menyebutkan, peningkatan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu tersebut setiap tahun naik sebesar 5.21% per tahun atau 10.69 ribu per tahun. Sedangkan peningkatan persentase jumlah penduduk miskin rata-rata setiap tahun sebesar 0.17 poin persen per tahun. Permasalahan yang dihadapi dalam Rizal Fahmi; Dewi Ajeng Khutomah, Hudaya Latuconsina; Hilman (2026). *Strategi Peningkatan Pendapatan Sebagai Upaya Menurunkan Kemiskinan Ekstrem di Desa Lokus Prioritas Kabupaten Tangerang*

penanggulangan kemiskinan ekstrem di desa-desa lokus prioritas Kabupaten Tangerang terletak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang layak dan keterampilan yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan temuan Zubaidah dan Kurniawan (2022) yang mengungkapkan bahwa lemahnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat turut memperlambat penanganan kawasan permukiman miskin perkotaan di Indonesia.



Gambar 1.

Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Tangerang tahun 2018-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten dan Nasional, 2018-2024 (diolah)

Penelitian oleh (Arifin, 2019) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan pernikahan dini memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di sembilan provinsi di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan penurunan tingkat pengangguran melalui sektor ketenagakerjaan dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, studi oleh (Fadhliasis & Husni, 2023) menyoroti pentingnya advokasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pendekatan ini menekankan peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Faktanya, angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang masih tinggi. Berdasarkan data BPS (2023), menyatakan bahwa pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang sebesar 6,94%, menempatkannya pada posisi yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Banten sebesar 7,52%. TPT Kabupaten Tangerang juga lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah lain di Provinsi Banten, seperti Kabupaten Pandeglang (9,05%), Kabupaten Serang (9,94%), dan Kota Serang (7,45%). Namun, Kabupaten Tangerang masih memiliki TPT yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional yang berada pada angka 5,32%.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Tangerang, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem, di desa-desa lokus prioritas masih tinggi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang menyatakan bahwa peningkatan ketenagakerjaan dapat mengurangi kemiskinan dan realitas di lapangan. Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja diyakini dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Namun, tantangan dalam sektor ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja. Perubahan struktur ekonomi dan persaingan global telah mempengaruhi stabilitas kelas menengah di Indonesia. Laporan oleh (Sulaiman, 2024) mengindikasikan bahwa penurunan jumlah kelas menengah, sebagian disebabkan oleh pengurangan tenaga kerja di sektor manufaktur, dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan. Sementara, laporan oleh (*Financial Times*, 2025) mengindikasikan bahwa penurunan jumlah kelas menengah, sebagian disebabkan oleh pengurangan tenaga kerja di sektor manufaktur, dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sektor ketenagakerjaan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di desa-desa lokus prioritas Kabupaten Tangerang serta merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kontribusi sektor ketenagakerjaan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Kemiskinan ekstrem, khususnya di desa-desa prioritas Kabupaten Tangerang, merupakan tantangan serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Oleh karena itu, peran sektor ketenagakerjaan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di desa-desa prioritas Kabupaten Tangerang harus mencakup strategi holistik dan pendekatan terpadu. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang untuk tahun 2025-2029

B. METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2017–2024. Data sekunder ini meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, serta indikator lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kemiskinan

Analisis Karakteristik Bidang Ketenagakerjaan

Analisis karakteristik permasalahan kemiskinan non konsumsi bidang ketenagakerjaan di Provinsi Banten menggunakan dua indikator utama, yakni tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat angkatan partisipasi angkatan kerja (TPAK). Penggunaan indikator ini didasarkan pada kondisi dimana jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah semakin meningkat rata-rata lebih dari 50%. Oleh karena itu, dalam upaya untuk penganggulangan kemiskinan di Provinsi Banten, maka diperlukan penyelesaian atau mengurangi jumlah pengangguran.

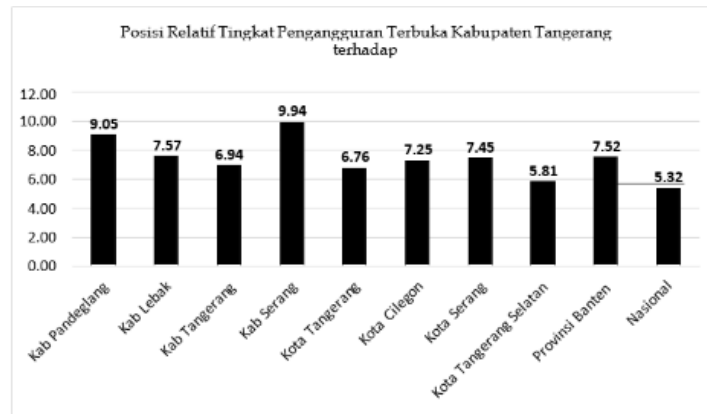
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Bidang ketenagakerjaan telah menjadi program prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang, karena merupakan salah satu indikator utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Tangerang, mengingat bidang ini memiliki peran signifikan sebagai Rizal Fahmi; Dewi Ajeng Khutomah, Hudaya Latuconsina; Hilman (2026). *Strategi Peningkatan Pendapatan Sebagai Upaya Menurunkan Kemiskinan Ekstrem di Desa Lokus Prioritas Kabupaten Tangerang*

penyumbang terbesar keberhasilan pembangunan. Namun, di sisi lain, persentase jumlah pengangguran di Kabupaten Tangerang turut memberikan dampak negatif, seperti yang tercatat pada tahun 2022, di mana tingkat pengangguran di Provinsi Banten menjadi yang tertinggi ketiga di Indonesia. Kondisi ini memunculkan berbagai permasalahan sosial, termasuk meningkatnya angka pengangguran yang menjadi penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Permasalahan sosial di bidang ketenagakerjaan ini juga menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan daerah, karena berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat dan menambah beban sosial serta ekonomi di Kabupaten Tangerang. Pengangguran adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja sama sekali. Pengangguran merupakan salah satu indikator dalam bidang ketenagakerjaan, terutama pengangguran terbuka. Pengangguran Terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Beberapa kategori yang termasuk dalam pengangguran terbuka adalah tidak punya pekerjaan dan yang mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan dan yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin rendah peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong timbulnya permasalahan sosial.

a. Posisi Relatif

Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang sebesar 6,94%, menempatkannya pada posisi yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Banten sebesar 7,52%. TPT Kabupaten Tangerang juga lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah lain di Provinsi Banten, seperti Kabupaten Pandeglang (9,05%), Kabupaten Serang (9,94%), dan Kota Serang (7,45%). Namun, Kabupaten Tangerang masih memiliki TPT yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional yang berada pada angka 5,32%. Di antara wilayah di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan mencatatkan TPT terendah sebesar 5,81%, sedangkan Kabupaten Serang memiliki TPT tertinggi sebesar 9,94%. Kota Tangerang juga menunjukkan performa yang baik dengan TPT sebesar 6,76%, sedikit lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tangerang. Dibandingkan dengan wilayah lain, posisi relatif Kabupaten Tangerang cukup baik dalam konteks regional Banten, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan agar mencapai atau bahkan melampaui capaian tingkat nasional. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses pekerjaan dan program pelatihan keterampilan kerja dapat menjadi langkah strategis untuk menekan angka pengangguran lebih jauh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

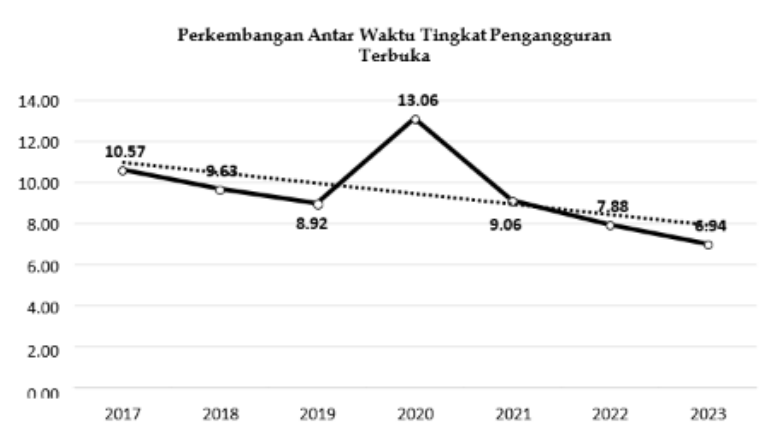


Gambar 2.

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi Banten dan Nasional (%) Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Banten dan Indonesia (2023)

b. Perkembangan Antar Waktu

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang menunjukkan tren fluktuatif dalam periode 2017–2023. Pada tahun 2017, TPT tercatat sebesar 10,57%, yang kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 8,92% pada tahun 2019. Namun, dampak pandemi COVID-19 terlihat jelas pada tahun 2020, ketika TPT melonjak signifikan menjadi 13,06%, mencerminkan gangguan ekonomi yang luas. Sejak 2021, TPT di Kabupaten Tangerang mulai menunjukkan perbaikan. Angka pengangguran turun menjadi 9,06% pada 2021 dan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 7,88% pada 2022 dan 6,94% pada 2023. Penurunan yang konsisten ini menunjukkan keberhasilan upaya pemulihan ekonomi daerah setelah pandemi, termasuk peningkatan kesempatan kerja dan stabilisasi pasar tenaga kerja. Perkembangan ini juga menunjukkan kinerja Kabupaten Tangerang yang sejalan dengan tren provinsi dan nasional, meskipun dengan perbedaan tingkat yang beragam. Penurunan TPT yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator positif dalam mengurangi pengangguran dan memperkuat ekonomi lokal. Upaya lanjutan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas lapangan kerja perlu terus didorong guna mempertahankan tren positif ini.



**Gambar 3. Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang (%)
Tahun 2017-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2023)

c. Efektivitas

Efektivitas pengelolaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari kemampuannya mengatasi tantangan ekonomi di berbagai periode. Pada 2017, TPT tercatat cukup tinggi, yaitu 10,57%, namun berhasil menurun secara bertahap hingga 8,92% pada 2019. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan stabilisasi ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan lonjakan TPT menjadi 13,06%, menyoroti tantangan besar yang dihadapi pasar tenaga kerja. Namun, pemulihan mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya, dengan TPT turun menjadi 9,06% pada 2021, kemudian menjadi 7,88% pada 2022, dan akhirnya mencapai 6,94% pada 2023. Penurunan yang konsisten ini menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah dan sektor swasta dalam memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan akses kerja, dan memberdayakan masyarakat pasca-pandemi. Efektivitas ini juga dapat dilihat dari keberhasilan Kabupaten Tangerang dalam menekan pengangguran ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan puncaknya pada 2020. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini, diperlukan kesinambungan dalam kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



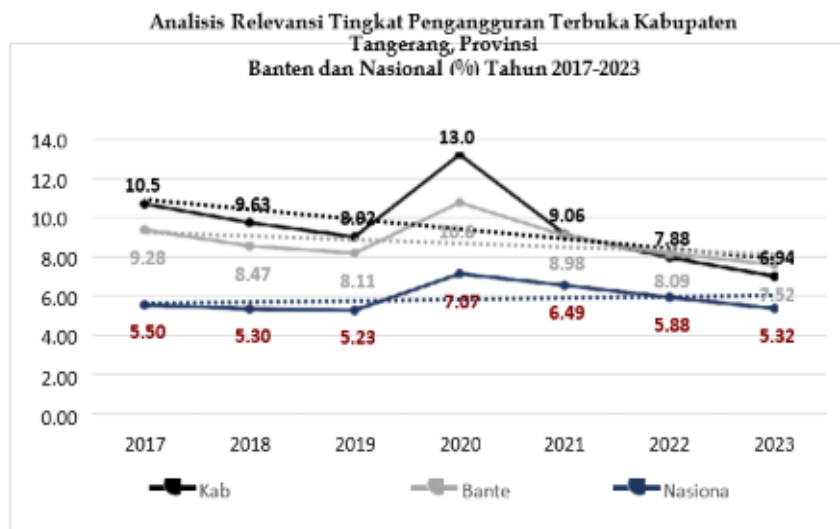
**Gambar 4. Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang (%)
Tahun 2017-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2023)

d. Relevansi

Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang terhadap tingkat provinsi Banten dan nasional menunjukkan dinamika yang menarik selama periode 2017–2023. Secara umum, TPT Kabupaten Tangerang berada di bawah rata-rata Banten tetapi lebih tinggi dibandingkan nasional, mencerminkan peran Kabupaten Tangerang sebagai wilayah strategis yang masih menghadapi tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada 2017, TPT Kabupaten Tangerang sebesar 10,57% lebih tinggi dibandingkan Banten (9,28%) dan nasional (5,50%). Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam pengangguran di tingkat lokal. Penurunan berlanjut hingga 2019, dengan TPT Kabupaten Tangerang menjadi 8,92%, masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi (8,11%) tetapi hampir dua kali lipat dibandingkan nasional (5,23%).

Pandemi COVID-19 pada 2020 membawa dampak besar dengan lonjakan TPT Kabupaten Tangerang menjadi 13,06%, lebih tinggi dari Banten (10,64%) dan nasional (7,07%). Hal ini mengindikasikan kerentanan pasar kerja lokal terhadap guncangan ekonomi global. Namun, langkah pemulihan yang efektif mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2023, TPT Kabupaten Tangerang berhasil ditekan menjadi 6,94%, berada di bawah Banten (7,52%) tetapi masih lebih tinggi dibandingkan nasional (5,32%). Relevansi ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Tangerang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengatasi pengangguran, masih ada ruang untuk memperkuat strategi penciptaan lapangan kerja agar lebih sejalan dengan tingkat pengangguran nasional yang lebih rendah.



Gambar 5.

Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional (%) Tahun 2017-2023

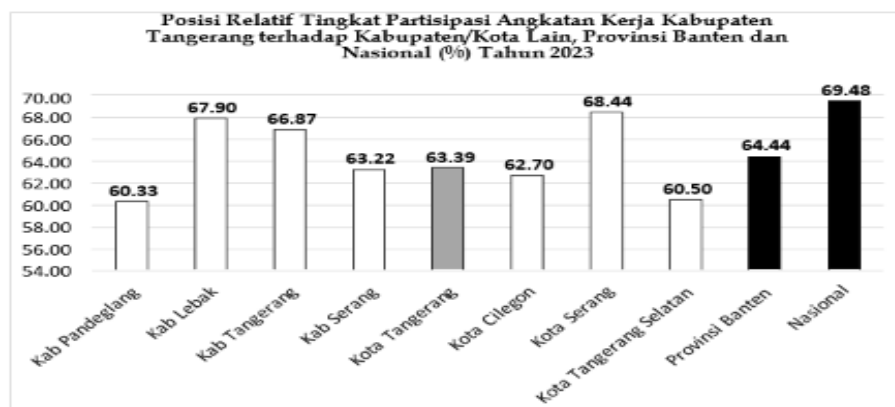
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia (2023)

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK bermanfaat untuk melihat penduduk yang potensial memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

a. Posisi Relatif

Pada tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tangerang sebesar 66,87% menunjukkan posisi yang cukup kompetitif dibandingkan wilayah lain di Provinsi Banten dan nasional. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi sebesar 64,44%, TPAK Kabupaten Tangerang berada di atas, mengindikasikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan tenaga kerja di Banten. Namun, angka ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 69,48%, menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan partisipasi angkatan kerja agar sejajar dengan skala nasional. Dalam lingkup provinsi, Kabupaten Tangerang menempati posisi yang relatif unggul dibandingkan beberapa wilayah seperti Kabupaten Pandeglang (60,33%), Kabupaten Serang (63,22%), dan Kota Tangerang (63,39%). Namun, TPAK Kabupaten Tangerang masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Lebak (67,90%) dan Kota Serang (68,44%), yang memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja tertinggi di Banten. Dibandingkan dengan Kota Tangerang Selatan yang memiliki TPAK terendah di Banten (60,50%), Kabupaten Tangerang menunjukkan performa yang lebih baik. Secara keseluruhan, posisi relatif Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi tenaga kerjanya cukup baik, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja guna mencapai atau melampaui tingkat partisipasi tenaga kerja nasional.

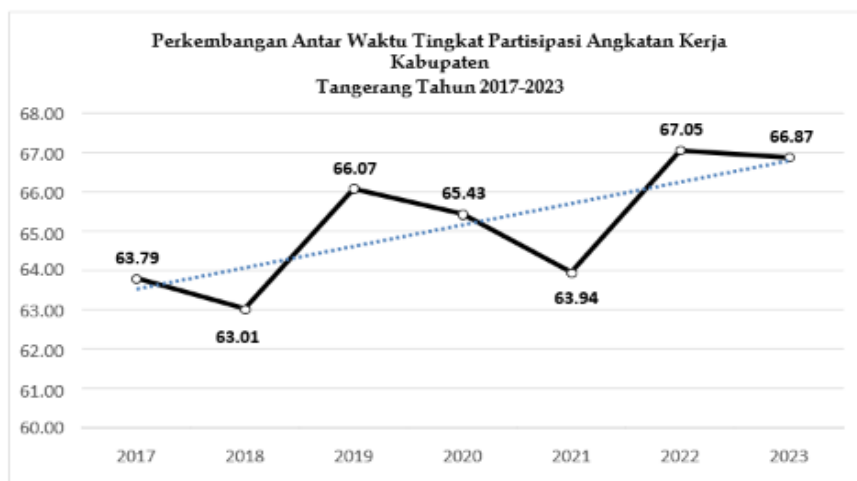


Gambar 6. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi Banten dan Nasional (%) Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia (2023)

b. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tangerang selama periode 2017-2023 menunjukkan fluktuasi dengan tren cenderung meningkat. Pada tahun 2017, TPAK tercatat sebesar 63,79%, mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 menjadi 63,01%. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan menjadi 66,07%, yang mencerminkan perbaikan dalam keterlibatan angkatan kerja. Namun, pada tahun 2020, TPAK sedikit menurun menjadi 65,43%, kemungkinan akibat dampak awal pandemi COVID-19 terhadap pasar tenaga kerja. Tahun 2021 kembali menunjukkan penurunan kecil ke angka 63,94%, tetapi diikuti oleh lonjakan tajam pada tahun 2022, mencapai 67,05%, angka tertinggi selama periode tersebut. Pada tahun 2023, TPAK sedikit menurun menjadi 66,87%, tetapi masih mempertahankan tingkat yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, TPAK Kabupaten Tangerang menunjukkan kemampuan untuk pulih dan bahkan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja pasca-pandemi, dengan tren jangka panjang yang relatif stabil dan mengarah pada perbaikan. Upaya untuk menjaga momentum ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.



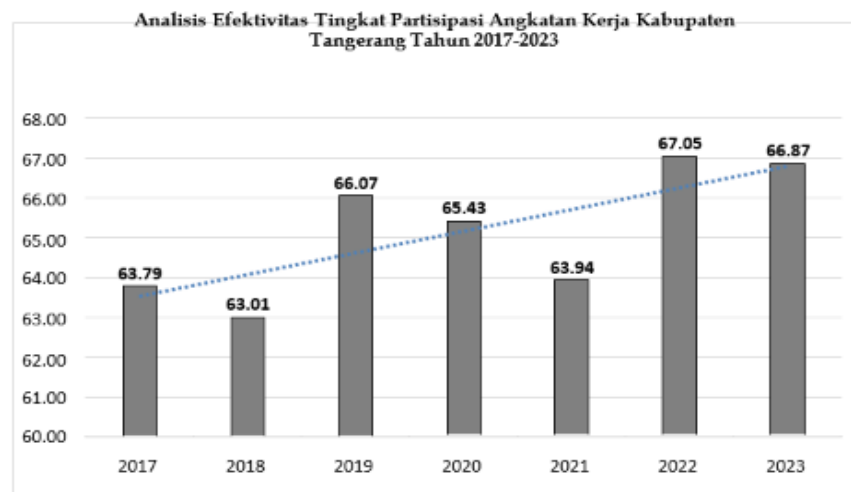
Gambar 7.

Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2023)

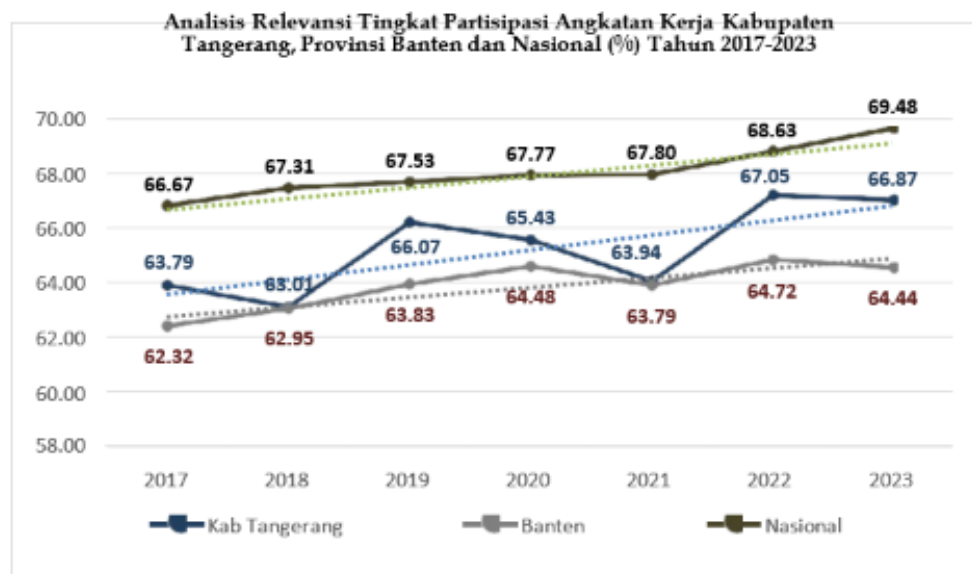
c. Efektivitas

Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tangerang selama periode 2017-2023 dapat dinilai dari kemampuan wilayah ini dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, seperti dampak pandemi COVID-19. TPAK menunjukkan fluktuasi, tetapi secara keseluruhan tetap berada pada tingkat yang kompetitif. Pada tahun 2017, TPAK tercatat sebesar 63,79%, yang sedikit menurun menjadi 63,01% pada tahun 2018. Penurunan ini mungkin mencerminkan tantangan ekonomi yang memengaruhi partisipasi tenaga kerja. Namun, pada tahun 2019, TPAK meningkat signifikan menjadi 66,07%, menunjukkan perbaikan dalam keterlibatan angkatan kerja. Pada tahun 2020, TPAK sedikit menurun menjadi 65,43%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh awal pandemi COVID-19. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022, ketika TPAK mencapai angka tertinggi dalam periode tersebut, yakni 67,05%. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan kecil menjadi 66,87%, angka ini tetap menunjukkan efektivitas yang baik dalam mempertahankan tingkat partisipasi yang tinggi. Secara keseluruhan, efektivitas TPAK Kabupaten Tangerang terlihat dari kemampuannya beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan sosial, serta dari kecenderungan peningkatan partisipasi dalam jangka panjang.



Gambar 8. Analisis Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2023)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 menunjukkan relevansi yang kuat jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Banten dan Nasional. TPAK Kabupaten Tangerang tercatat sebesar 66,87%, yang lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Banten sebesar 64,44%, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 69,48%. Selama periode 2017-2023, TPAK Kabupaten Tangerang secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Banten, menunjukkan posisi yang kuat dalam konteks regional. Pada beberapa tahun seperti 2022, perbedaan ini cukup signifikan, dengan Kabupaten Tangerang mencatat 67,05% dibandingkan dengan Provinsi Banten yang hanya 64,72%. Namun, TPAK Kabupaten Tangerang tetap berada di bawah rata-rata nasional sepanjang periode tersebut, mencerminkan ruang untuk peningkatan dalam meningkatkan keterlibatan tenaga kerja hingga mendekati standar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Tangerang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang baik secara regional, terdapat peluang untuk mengoptimalkan kontribusi angkatan kerja agar lebih kompetitif di tingkat nasional. Upaya yang diarahkan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong partisipasi kelompok rentan dapat menjadi langkah strategis untuk mendekati atau melampaui rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9. Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional (%) Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Kab. Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia (2023)

Setelah melakukan identifikasi karakteristik permasalahan kemiskinan non konsumsi bidang ketenagakerjaan dengan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2. Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Ketenagakerjaan

NO	Indikator Utama	Posisi Relatif	Aspek yang dianalisis perkembangan antar waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	Lebih rendah dari provinsi banten, lebih tinggi dari Nasional	Cenderung Menurun	Efektif	Cukup Relevan
2	Tingkat Partisipasi Angktan Kerja (TPAK)	Lebih Tinggi dari Provinsi Banten, Lebih Rendah dari Nasional	Cenderung Meningkatkan	Efektif	Relevan

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Hasil Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan masalah yang harus segera diatasi dalam rangka penganggulungan kemiskinan. Mengingat, salah satu determinan peningkatan kemiskinan adalah peningkatan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang. Semakin kecil capaian angka pengangguran terbuka, maka semakin baik, atau sebaliknya. Hasil evaluasi bidang ketenagakerjaan menunjukkan bahwa capaian penanganan pengangguran cukup berhasil. Untuk lebih jelas, perbandingan antara realisasi angka pengangguran dengan target penurunan angka pengangguran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang 2019-2023

Tahun	RPJMD	Realisasi	Persen
2019	9.65	8.92	92.44
2020	9.61	13.06	135.90
2021	9.32	9.06	97.21
2022	9.05	8.55	94.48
2023	8.80	6.94	78.86
Rata-Rata	9.29	9.31	100.22

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka selama 2019-2023 dengan rata-rata 9.29% yang menjadi target RPJMD dan realisasinya rata-rata sebesar 9.31% atau rata-rata sebesar 100.22%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang untuk menekan pengangguran kurang berhasil, karena melebihi angka 100%. Oleh karena itu, program-program yang selama ini dilakukan dapat mengurangi pengangguran hendaknya lebih ditingkatkan karena berdampak pada peningkatan kemiskinan. Angka tersebut menunjukkan masih cukup tinggi.

2. Analisis Pekerjaan Penduduk Miskin

Besarnya jumlah angkatan kerja, menuntut kesempatan atau lapangan kerja yang lebih banyak. Lapangan kerja datang dari pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan lapangan kerja yang banyak, sehingga akan selalu ada angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar. Bagian yang tidak terserap ini, dikenal sebagai penganggur dan rasio penganggur terhadap total angkatan kerja disebut dengan istilah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penduduk miskin identik dengan pengangguran dan pendapatan yang rendah. Kondisi penduduk miskin yang tidak bekerja di Kabupaten Tangerang selama 2018-2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Tingkat kecepatan penambahan jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin di Provinsi Banten selama periode yang sama.

Pada tahun 2018 dan 2019, jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja di Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Namun sejak tahun 2020-2023, pertambahan jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tangerang hendaknya fokus pada penurunan pengangguran yang berasal dari penduduk miskin. Mengingat, jumlah penduduk miskin menjadi kontributor yang cukup signifikan dalam peningkatan pengangguran di Kabupaten Tangerang. Dengan kata lain, dengan mengurangi pengangguran penduduk miskin, maka angka pengangguran di Kabupaten Tangerang akan turun.

Prioritas Intervensi dan Analisis Fiskal

Faktor kemiskinan dalam bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dari status Kepala Keluarga (KK) yang tidak bekerja, terutama pada kelompok usia produktif. Kondisi ini berdampak signifikan pada tingkat kesejahteraan keluarga, karena ketiadaan pendapatan tetap menghambat kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Hasil analisis dari laporan Pusat Studi Kemiskinan Universitas Indonesia (2023) menunjukkan bahwa keluarga yang kepala keluarganya tidak bekerja cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk berada dalam kategori miskin. Hasil identifikasi crosstab analysis menunjukkan kepala keluarga yang berada di kelompok usia 19-29 dan 30-39 cenderung lebih sedikit dibandingkan kelompok usia di atasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
Hasil Analisis Crosstab Kepala KK Tidak Bekerja Menurut Kelompok Usia di 10 Desa Prioritas

Desa/Kelurahan	Kepala KK Tidak Bekerja Kelompok Usia						Total
	Usia 19-29 Tahun	Usia 30-39 Tahun	Usia 40-49 Tahun	Usia 50-59 Tahun	Usia 60-69 Tahun	Usia 70 Tahun	
Pangarengan	10	41	45	75	72	80	323
Sukamanah	2	25	33	46	44	35	185
Daon	4	31	45	49	98	84	311
Kampung Besar	11	39	74	91	122	86	423
Kiara Payung	5	25	49	49	84	62	274
Sindangasih	7	40	57	77	85	42	308
Sindangsono	1	17	35	35	42	35	165
Lebak Wangi	2	15	39	50	48	49	203
Cikuya	16	43	55	69	78	88	349
Rancagede	5	14	17	14	42	72	164
Total	63	290	449	555	715	633	2.705

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Kemudian apabila dilihat dari kepala keluarga perempuan belum/tidak bekerja dilihat berdasarkan desil di dominasi oleh desil 1 dan desil 2. Kemudian desil 4 dan desil 3. Kepala keluarga perempuan belum/tidak bekerja yang berada di desil 1 berjumlah 869 KK. Sementara kepala keluarga perempuan belum/tidak bekerja yang berada di desil 2 berjumlah 867 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Hasil Analisis Crosstab kepala keluarga perempuan belum/tidak bekerja Menurut desil di 10 Desa Prioritas

Desa/Kelurahan	KK Perempuan Belum/Tidak Bekerja				Total
	Desil 1-4				
	1	2	3	4	
Pangarengan	133	93	44	53	323
Sukamanah	68	48	38	31	185
Daon	85	123	57	46	311
Kampung Besar	137	135	72	79	423
Kiara Payung	89	105	52	28	274
Sindangasih	144	60	47	57	308
Sindangsono	37	39	28	61	165
Lebak Wangi	50	62	35	56	203
Cikuya	98	109	83	59	349
Rancagede	28	93	21	22	164
Total	869	867	477	492	2.705

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Indikator Peningkatan Pendapatan Penanggulangan Kemiskinan

Untuk memastikan bahwa strategi yang dirancang berjalan sesuai dengan tujuan, diperlukan indikator kinerja yang konkret, terukur, dan relevan. Indikator-indikator ini akan menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana upaya penanggulangan kemiskinan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, indikator ini juga berfungsi untuk membandingkan efektivitas kebijakan yang diterapkan, serta memberikan umpan balik bagi penyempurnaan rencana yang sedang berjalan. Indikator kinerja utama menunjukkan Peningkatan Pendapatan dalam Grand Design Penanggulangan Kemiskinan di 10 Desa Prioritas (Desil 1–3), Kabupaten Tangerang, periode 2025–2029. Pada indikator peningkatan pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada baseline tahun 2023 tercatat sebesar 6,94% ditargetkan terus menurun setiap tahunnya, yaitu menjadi 6,86% pada 2025, 6,77% pada 2026, 6,69% pada 2027, 6,60% pada 2028, dan 6,52% pada 2029, dengan target akhir tahun 2029 tetap berada pada angka 6,52%. Adapun indikator persentase penduduk miskin yang tidak bekerja, dari baseline sebesar 43,04%, ditargetkan turun menjadi 41,32% pada 2025, 39,61% pada 2026, dan 37,8% pada 2027, sebelum akhirnya mencapai 39,61% pada akhir tahun 2029.

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup dua bidang utama, yaitu ketenagakerjaan dan ekonomi. Pada bidang ketenagakerjaan, upaya yang dilakukan meliputi penambahan kartu prakerja bagi penduduk miskin yang produktif pada rentang usia 19–59 tahun sebanyak 970 jiwa, peningkatan kompetensi dan pendampingan penduduk produktif melalui pendidikan dan pelatihan profesi, serta peningkatan produktivitas hasil industri rumah tangga. Sementara itu, pada bidang ekonomi, program yang dijalankan meliputi pembinaan penduduk miskin yang berprofesi sebagai petani sebanyak 806 jiwa, serta pembinaan penduduk miskin yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 36 jiwa yang tersebar di 6 desa, yaitu Desa Pangarengan, Desa Sukamanah, Desa Daon, Desa Kampung Besar, Desa Kiara Payung, dan Desa Cikuya. Selain itu, dilakukan pula peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani, penambahan cakupan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang sebanyak 1.394 jiwa, serta peningkatan literasi keuangan bagi pedagang. Upaya lainnya adalah optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk plotting di 3 desa, yaitu Desa Cikuta, Desa Sindangsono, dan Desa Kampung Besar, pendirian ekosistem industri rumah tangga di desa, serta optimalisasi wisata desa.

C. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bidang ketenagakerjaan dapat berperan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di desa lokus prioritas Kabupaten Tangerang. Dalam aspek ketenagakerjaan, strategi yang diusulkan mencakup penambahan kartu prakerja bagi penduduk miskin produktif, peningkatan kompetensi melalui pelatihan profesi, serta peningkatan produktivitas industri rumah tangga. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, pembinaan bagi petani dan nelayan, peningkatan keterampilan serta literasi keuangan bagi pedagang, optimalisasi peran BUMDes, serta pengembangan ekosistem industri rumah tangga dan wisata desa menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini

menegaskan bahwa keterpaduan kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Secara umum, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya intervensi kebijakan berbasis potensi lokal dan pemberdayaan ekonomi komunitas dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Di wilayah lain, strategi serupa juga telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai rekomendasi, kolaborasi pentahelix diperlukan agar implementasi program berjalan optimal. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala agar proses pelaksanaan program berjalan sesuai target. Kemudian, optimalisasi peran BUMDes dan wisata desa perlu didukung dengan kebijakan yang memperkuat akses pasar dan permodalan. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi aspek sosial dan budaya yang memengaruhi efektivitas program pengentasan kemiskinan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Persentase Penduduk Miskin (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Indonesia*.
- BPS. Badan Pusat Statistik. (2018). *Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Persentase Penduduk Miskin (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Miskin (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Indonesia*.
- BPS. Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Miskin (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Indonesia*.
- BPS. Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Indonesia*.
- BPS. Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Indonesia*.
- BPS. Badan Pusat Statistik. (2023). *Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin (%) di Indonesia*.
- BPS. Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- BPS Provinsi Banten. (2018). *Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Provinsi Banten* BPS Provinsi Banten. (2018). *Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Banten*
- BPS Provinsi Banten. (2018). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Provinsi Banten* BPS Provinsi Banten. (2018). *Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Provinsi Banten*
- Rizal Fahmi; Dewi Ajeng Khutomah, Hudaya Latuconsina; Hilman (2026). *Strategi Peningkatan Pendapatan Sebagai Upaya Menurunkan Kemiskinan Ekstrem di Desa Lokus Prioritas Kabupaten Tangerang*

- BPS Provinsi Banten. (2019). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2019). Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Banten
- BPS Provinsi Banten. (2019). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2019). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Provinsi Banten
- BPS Provinsi Banten. (2020). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2020). Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Banten
- BPS Provinsi Banten. (2020). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2020). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2021). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2021). Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2021). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2021). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Provinsi Banten
- BPS Provinsi Banten. (2022). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2022). Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Banten
- BPS Provinsi Banten. (2022). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2022). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2023). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Provinsi Banten
- BPS Provinsi Banten. (2023). Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Banten
- BPS Provinsi Banten. (2023). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Provinsi Banten
- BPS Provinsi Banten. (2024). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Provinsi Banten
- BPS Provinsi Banten. (2024). Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2024). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Provinsi Banten
- BPS Tangerang. (2018). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Kabupaten Tangerang
- BPS Tangerang. (2018). Persentase Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Tangerang
BPS Tangerang. (2018). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Kabupaten Tangerang
BPS Tangerang. (2018). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Tangerang
- BPS Tangerang. (2019). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Kabupaten Tangerang
- BPS Tangerang. (2019). Persentase Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Tangerang
BPS Tangerang. (2019). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Kabupaten Tangerang
BPS Tangerang. (2019). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Tangerang
- BPS Tangerang. (2020). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Kabupaten Tangerang
- BPS Tangerang. (2020). Persentase Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Tangerang
BPS Tangerang. (2020). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Kabupaten Tangerang
BPS Tangerang. (2020). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Tangerang
- Rizal Fahmi; Dewi Ajeng Khutomah, Hudaya Latuconsina; Hilman (2026). *Strategi Peningkatan Pendapatan Sebagai Upaya Menurunkan Kemiskinan Ekstrem di Desa Lokus Prioritas Kabupaten Tangerang*

- BPS Tangerang. (2021). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Kabupaten Tangerang
- BPS Tangerang. (2021). Persentase Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Tangerang BPS Tangerang. (2021). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Kabupaten Tangerang BPS Tangerang. (2021). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Tangerang BPS Tangerang. (2022). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Kabupaten Tangerang
- BPS Tangerang. (2022). Persentase Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Tangerang BPS Tangerang. (2022). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Kabupaten Tangerang BPS Tangerang. (2022). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Tangerang BPS Tangerang. (2023). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Kabupaten Tangerang
- BPS Tangerang. (2023). Persentase Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Tangerang BPS Tangerang. (2023). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Kabupaten Tangerang BPS Tangerang. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Tangerang BPS Tangerang. (2024). Jumlah Penduduk Miskin Yang Tidak Bekerja (%) di Kabupaten Tangerang
- BPS Tangerang. (2024). Persentase Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Tangerang
- BPS Tangerang. (2024). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) di Kabupaten Tangerang BPS Tangerang. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Tangerang
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (1989). *Pengantar ekonomi pertanian* (Ed. 3). LP3ES.
- Priyono. (2016). *Teori Ekonomi* (Teddy Chandra, Ed.5). Dharma Ilmu.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal

- Adinda, & Abd. Mubaraq. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. 1, 33–41.
- Amelia, N., Oktarahmadini, S., & Harahap, A. (2025). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Medan. 1–23. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i1.76>
- Arifin. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, 1(2), 58–65. <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis>
- Fadhliasis, & Husni, A. F. (2023). Analisis SPK Penerima Bansos PKH dengan Metode SAW Pada Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi. *Jurnal Informatika, Sistem Informasi Dan Kehutanan (FORSINTA)*, 2(2).
- Rahmawati, D., & Sebayang, A. F. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2021-2022. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Unisba*, 3(2), 93–100. <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i1.ID.12233>
- Rizal Fahmi; Dewi Ajeng Khutomah, Hudaya Latuconsina; Hilman (2026). *Strategi Peningkatan Pendapatan Sebagai Upaya Menurunkan Kemiskinan Ekstrem di Desa Lokus Prioritas Kabupaten Tangerang*

- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial
Poverty Reduction Through the Social Welfare Center. *Sosio Informa*, 3(03), 273–286.
- Taufiq, N. (2022). Penciri Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten Prioritas Penanganan
Kemiskinan Ekstrem (Characteristics of Extreme Poverty in 35 Priority Districts for
Extreme Poverty).
- Zubaidah, S., & Kurniawan, I. A. (2022). Pertumbuhan Perkampungan Kumuh di Indonesia.
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA), 12(2), 74–85.
<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>